



UNIVERSITAS BOROBUDUR

PROGRAM PASCASARJANA

Program Doktor Ilmu Ekonomi (S3) - Program Doktor Ilmu Hukum (S3)
Program Magister Manajemen (S2) - Program Magister Ilmu Hukum (S2)

Kampus A : Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur. Telp. (021) 86612658, 8618293, 8613877 Fax : (021) 86612658
Kampus C : Jl. Temada No. 7 Rawamangun, Telp. (021) 4758055, 4758075 Fax : (021) 4714204

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BOROBUDUR

Nomor : 66/Q.1/PPs-UB/XII/2015

Tentang

Penetapan Pembimbing bagi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum
Pada Tahun Akademik 2015 - 2016 (Semester Ganjil)

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BOROBUDUR

- Menimbang** :
1. bahwa untuk melaksanakan Pembimbingan bagi mahasiswa dipandang perlu untuk mengangkat dan menugaskan tenaga pembimbing pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Borobudur;
 2. bahwa tenaga pembimbing yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi akademik maupun profesional untuk diangkat sebagai tenaga pembimbing sesuai dengan bidangnya;
 3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas diperlukan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Borobudur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Mendinas No. 247/D/O/2010 tentang Pembentukan Program Doktor Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Di Lingkungan Universitas Borobudur Di Jakarta;
 7. Keputusan Dirjen Dikti No. 034/DIKTI/Kep/2002 tentang Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri;
 8. Statuta Universitas Borobudur Tahun 2013;
- Memperhatikan** :
1. Hasil keputusan rapat pimpinan Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Borobudur tanggal 2 Nopember 2015.
 2. Kalender Akademik Program Doktor Ilmu Hukum Tahun Akademik 2015 – 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Menetapkan nama-nama mahasiswa dan nomor pokok pada kolom II (dua) yang menulis disertasi dengan judul pada kolom III (tiga) dengan nama-nama pembimbing pada kolom IV (empat).

Kedua

Menugaskan kepada mahasiswa sebagaimana yang tercantum pertama untuk menyelesaikan tugas penelitian dan penulisan disertasi selambat-lambatnya dalam kurun waktu lima semester.

ga: Mewajibkan pembimbing untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan pedoman akademik yang berlaku di Program Pascasarjana Universitas Borobudur.

apat: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Jakarta

Tanggal : 28 Desember 2015



Dr. H. Mohammad Faisal Amir



PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur. ☎ dan Fax. (021) 86612658

Lampiran SK. Direktur Program Pascasarjana Universitas Borobudur

Nomor : 66/Q.1/PPs-UB/XII/2015

Tanggal : 28 Desember 2015

REKAP JUDUL DISERTASI DAN PROMOTOR/KO. PROMOTOR
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR

Nomor		NAMA	JUDUL	PROMOTOR	KO. PROMOTOR
Urt.	POKOK				
1.	14730087	Benni Rusli	UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN DENGAN PELAKU USAHA (STUDI PADA BPSK PROVINSI SUMATERA BARAT)	Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, M	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, MH
2.	14730088	Riswadi	HAK KEKEBALAN, ADVOKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH	Prof. Dr. Ade Saptomo, SH, MSi
3.	14730089	Ali Ridlo	OPTIMALISASI YURIDIS PENGIRIMAN PASUKAN TNI PADA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL INDONESIA DI LUAR PERAIRAN YURIDIKSI NASIONAL BERDASARKAN UNCLOS 1982	Prof. Dr. Kuntoro, SH, MH	Dr. Kresno Buntoro, SH, MH (Kolonel Laut)
4.	14730090	Tardi Panggabean	LEMahnya PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN	Prof. Dr. Hj. Wary Suwanti Haryono, SH, MH	Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH, MH
5.	14730093	Nyimas Enny Fitriyana W.	PLURALISME DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, M	Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH, MH
6.	14730094	Rahmah Marsinah	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	Prof. Dr. Surya Jaya, SH, MEI	Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH, MH
7.	14730095	Kanou Armyanto	HAK KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB WALI AMANAT SELAKU KUASA PEMEGANG OBLIGASI (SUATU KAJIAN HAL EMITEN GAGAL BAYAR (DEFAULT) DALAM KASUS PT. BANK GLOBAL INTERNATIONAL TBK)	Prof. Dr. Ade Saptomo, SH, MSi	Dr. Laode Rudita, SH, MH
8.	14730096	M. Zen	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERBAKAN	Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, SH, MA	Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, M



PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur. ☎ dan Fax. (021) 86612658

Nomor		NAMA	JUDUL	PROMOTOR	KO. PROMOTOR
Urut	POKOK				
9.	14730097	Cecep Priyatna	EFEKTIVITAS REGULASI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN LINTAS BATAS DI KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN BARAT DENGAN SERAWAK (MALAYSIA TIMUR)	Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, SH, MA	Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH, MH
10.	13730082	Muhammad Ferdian	PERJANJIAN PEMBERI LISENSI MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK	Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, SH, MA	Dr. Laode Rudita, SH, MH
11.	13730079	Adek Candra	KAJIAN HUKUM MENGENAI PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM	Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SIK, SH, MM, MBA
12.	13730086	Setia Jaya	PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PENSUN PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL.	Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, SH, MA	Dr. Hj. RA. Evita Isremo Israhadi, SH, MH
13.	12730052	Fadlan	ANALISIS KRITIS PENUNTIKAN DAN PENGANGKATAN JABATAN LURAH UNTUK MIEWJUDKAN GOOD GOVERNMENT DAN CLEAN GOVERNANCE (STUDI PENELITIAN DIKEMATAN MEDAN KOTA . KOTA MEDAN SUMATERA UTARA)	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH	Dr. Hidam SH, MKn
14.	12730053	Balqis Wasliati	KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PELANGGARAN PROSEDUR PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT	Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH



PROGRAM PASCASARJANA
Direktur,

Dr. H. Mohammad Faisal Amir

**LEMBARAN PERSETUJUAN
KOMISI PEMBIMBING DISERTASI**

**JUDUL : ANALISIS KRITIS SECARA YURIDIS PENGISIAAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA DALAM
PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PEMERINTAHAN KOTA
BATAM**

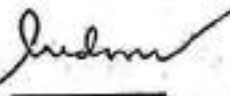
Disusun Oleh Mahasiswa:

**Nama : FADLAN
No Pokok : 12730052
Program Studi : Program Doktor Ilmu Hukum**

Tanda Tangan

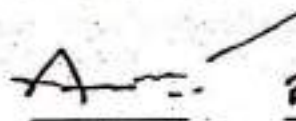
Tanggal

**Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh S.H., M.H.
Promotor**



25/10/2018

**Dr. H. Idham S.H., M.Kn
Co-Promotor**



28-09-2018

**PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
(JPT) PRATAMA DALAM PERSPEKTIF
PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI
PEMERINTAHAN
KOTA BATAM**

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3)
Program Pascasarjana Universitas Borobudur



Oleh
FADLAN
NPM: 12730053

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2019**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



FADLAN, Lahir di Medan pada 05 Juni 1988, beragama Islam, anak ke 10 (Sepuluh) dari 10 Bersaudara, lahir dari pasangan (Alm) H Usman Ismail dan (Almh) Hj Wataniah. Penulis beralamat di Perumahan Puri Selebriti 2 Blok A11 No 26, Kota Batam, Kepulauan Riau, menikah dengan E.Arinda Chikita S.H serta dikaruniai seorang putra bernama Umar Khalif Shakeel.

Riwayat pendidikan penulis yakni menamatkan Sekolah Dasar Negeri 064014 Medan lulus Tahun 2000, Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Medan lulus Tahun 2003, Sekolah Menengah Atas Kartika 1-2 Medan lulus Tahun 2006, Melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Lulus Tahun 2010, Kemudian penulis memasuki Progran Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Lulus Tahun 2012, selanjutnya pada Tahun 2012 melanjutkan pada Program Doktorat (S3) Universitas Borobudur Jakarta.

Selain itu penulis juga aktif menjadi staf pengajar di Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2012, Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al washliyah tahun 2012, serta Fakultas Hukum Universitas Batam 2015 s/d Sekarang. Untuk kegiatan berorganisasi pernah menjabat sebagai Ketua Badan Aspirasi Mahasiswa (BAM) Fakultas Hukum UISU 2008-2009, sebagai anggota Tetap Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan Wakil Sekertaris Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN/HAN) Kepulauan Riau 2016-2020.

Lokakarya, Diklat dan Seminar yang pernah diikuti antara lain: Pelatihan Advokat Hukum & Ham (PAHAM); Bonus Demografi dan Masa Depan Bangsa; Penguatan Otonomi Daerah Berdasarkan Konstitusi Melalui Optimalisasi dan Bagi Hasil Migas; Pranata Hukum dalam Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA); Tindak Pidana Perjudian dengan Modus Arena Ketangkasan Elektronik; Pertemuan Koordinasi Mahkamah Konstitusi Dengan Fakultas Hukum dan Bimtek Persidangan Jarak Jauh Bagi Pengelola Video Conference, Wacana Pemberian Otonomi Khusus Terhadap Kepulauan Riau.

ABSTRAK

FADLAN, NPM 12730052 Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kota Batam, di bawah bimbingan dan asuhan Promotor Prof. Dr Zudan Arif Fakrulloh S.H.,M.H dan Co Promotor Dr H Idham S.H., M.Kn.

Disertasi ini diharapkan dapat menjawab permasalahan tentang tatacara pengisian Jabatan Struktural yang lowong secara terbuka di instansi Pemerintahan yang merujuk kepada PERMEN RB No.13 tahun 2014. Jika merujuk terhadap aturan hukum yang sudah ada tersebut, proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama rawan dan rentan untuk menjadi sengketa hukum, hal ini disebabkan ketika melaksanakan penerapan sistem hukum sudah tidak benar serta bertentangan dengan parameter yang sudah diatur dengan tegas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Proses pelaksanaan promosi terbuka (*open bidding*) menurut UU No 5/2014 tentang ASN khususnya Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama seharusnya merujuk kepada Peraturan Pemerintah, Namun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia mengambil kebijakan khususnya mengeluarkan Peraturan Menteri sebagai dasar sebuah produk hukum dengan tingkatan yang lebih rendah, dikhawatirkan menimbulkan permasalahan dalam perspektif pertanggungjawaban publik dan pertanggungjawaban privat yang tidak mencerminkan perlindungan hukum berbasis keadilan substantif.

Penelitian disertasi ini menggunakan jenis dan/atau kualifikasi penelitian hukum yang bersifat normatif dan didukung dengan penelitian hukum yang bersifat empiris. Beberapa teori yang dipakai dan menjadi batu uji yakni Teori Organisasi, Teori Webberian, Teori Kewenangan, Teori Negara Hukum, Teori Birokrasi, Teori Organ serta Hukum Responsif.

Temuan dari hasil penelitian disertasi ini bahwa UU No 5/2014 tentang ASN telah mengatur tegas komitmen dan kemauan untuk mewujudkan birokrasi yang beretika dan bermoral yang harus dilakukan secara berkesinambungan, namun dalam praktik ketatanegaraan ketika mengeluarkan suatu kebijakan antar *out in* dan *out come* sebuah kebijakan mengalami cacat proses dan bertentangan dengan prinsip asas hukum administrasi Negara dan prinsip pembentukan produk hukum, sehingga dikhawatirkan dapat terjadi sengketa Tata Usaha Negara terhadap para pejabat yang diangkat dan ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural tertentu dalam rangka mengisi jabatan yang lowong sehingga pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan benar sehingga terciptanya akuntabilitas yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Tidak hanya itu sebuah sistem Birokrasi yang lincah dan responsif juga disampaikan pada penelitian ini yang mana dimaksudkan agar terlaksananya sebuah birokrasi yang berkualitas, berdaya guna serta mampu menjawab tantangan perkembangan kebutuhan birokrasi.

Kata kunci: Reformasi Birokrasi yang transparan dan berkesinambungan.

ABSTRACT

Filling Leadership Primary in the Perspective of Performance Accountability of the State Civil Apparatus in Batam City Government, under the guidance and of the Promoter of Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh SH, MH and Co Promoter Dr. H Idham SH, M .Kn..

The dissertation is to answer the question on the procedure for filling the vacant structural positions openly in government agencies that refer to Ministerial Decrees No.13/2014. If referring to the existing legal rules, the process of post high leadership inside liability is vulnerable and to become a legal dispute, this is because when implementing the application of the legal system it is already incorrect and contradicts parameters that have been explicitly regulated through Constitution of No. 12/2012 concerning the Formation of Legislation.

The process of implementing open bidding according to Constitution No. 5/2014 on bureaucrat Government, especially post high leadership inside liability should refer to Government Regulations, But the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of Indonesia adopted a policy specifically issuing Ministerial Regulations as the basis for a product law with a lower level , it is feared to cause problems in the perspective of public and private liability that do not reflect the protection of law based on substantive justice

This dissertation research uses normative type or legal research qualifications and is supported by empirical legal research. Some theories are used and become a touchstone namely Organizational Theory, Webberian Theory, Theory of Authority, Rule of Law, Bureaucratic Theory, Organ Theory and Responsive Law.

Findings from the results of this dissertation research to Constitution No. 5/2014 on bureaucrat Government has firmly set the commitment and willingness to realize an ethical and moral bureaucracy that must be carried out on an ongoing basis, but in the practice of state administration when issuing a policy between out-in and out-come a policy has a process flaw and is contrary to the principles of State administrative law and the principles of product formation law, so that there is a concern that State Administration disputes will occur with officials appointed and appointed to occupy certain structural positions in order to fill vacant positions so that the management and control of resources and the implementation of policies to achieve true objectives so that good accountability is created and in line with expectations Public. Not only that, an agile and responsive bureaucratic system was also conveyed in this research, which was intended to implement a quality bureaucracy that is efficient and capable of responding to the challenges of developing bureaucratic needs

Keywords: Bureaucratic Reform that is transparent and sustainable.

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan yang baik ini sepatutnya promovendus menghaturkan ucapan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Subhanawata'ala-Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, yang akhirnya promovendus dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini, berjudul yaitu **PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PEMERINTAHAN KOTA BATAM**. Disertasi ini guna mewujudkan kualitas pelayanan publik yang paripurna dengan memegang teguh asas-asas pemerintahan yang baik *good government and clean govenance* serta yang harus dilaksanakan oleh setiap pejabat birokrasi di daerah guna memberikan pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat. Pada bagian akhir kata pengantar ini, untuk selanjutnya promovendus menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama penulis tujukan kepada:

1. Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Borobudur (YPB) sebagai Penyelenggaran Universitas Borobudur; Bapak Prof. Dr. H. Basir Barthos selaku Rektor Universitas Borobudur, Dr. H. Mohammad Faisal Amir selaku Direktur Pascasarjana Universitas Brobudur yang juga telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada promovendus selama menulis Disertasi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M selaku Ketua Program Studi Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Brobudur;

3. Bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., M.H, sebagai Promotor ditengah kesibukan beliau dalam menjalankan tugas yang mulia untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Pejabat Negara yakni Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri, bapak Dr. H. Idham, SH., M.Kn sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Batam yang dalam hal ini juga bertindak sebagai Co-Promotor yang akan membimbing promovendus guna menuntaskan penelitian disertasi ini;
4. Buat (Alm) Ayahanda H. Usman Ismail serta (Almh) Ibunda Hj Wataniah, Istri yang terkasih E.Arinda Chikita S.H dan ananda tersayang Umar Khalif Shakeel yang selalu menjadi penyemangat serta selalu mendoakan promovendus
5. Ketua Umum Yayasan Griya Husada Batam Bapak DR H Rusli Bintang, Prof. Dr. Jemmy Rumengan S.E.,M.M sebagai pengawas Yayasan Griya Husada Batam, Ibunda Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, SH., M.Hum, yang telah banyak membantu moriil maupun materiil dalam upaya melaksanakan dan sekaligus menuntaskan perkuliahan;

Atas segala kekurangan dan kesalahan promovendus dalam penyajian disertasi dihaturkan maaf yang sebesar-besarnya

Batam, September 2019
Promovendus

F A D L A N
NPM: 12730053

DAFTAR ISI

	hal
Halaman Judul.....	i
Lembar Pesetujuan Panitia Penilaian Naskah Disertasi.....	ii
Lembara Pesetujuan Komisi Pembimbing.....	iii
Lembar Persetujuan Perbaikan Disertasi.....	iv
Persetujuan Perbaikan Sidang Tertutup.....	viii
Surat Pernyataan Originalitas.....	ix
Daftar Riwayat Hidup.....	x
Kata Pengantar.....	xi
Abstrak.....	xiii
Daftar Tabel.....	xix
Daftar Isi.....	xx
BAB I A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian.....	23
E. Kerangka Berpikir.....	24
F. Keaslian Penelitian.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Paradigma Birokrasi di Indonesia.....	31
1. Pengertian Birokrasi.....	31
2. Struktur Organisasi Birokrasi.....	36
3. Prinsip Dasar Good Governance dan Clean Government..	39

4. Reformasi Birokrasi.....	52
5. Kinerja Birokrasi.....	56
B. Landasan Teori.....	59
1. Teori Negara Hukum.....	59
2. Teori Kewenangan.....	64
3. Teori Birokrasi Max Weber.....	69
4. Teori Manajemen.....	75
5. Teori Organisasi.....	78
6. Teori Organ.....	81
C. Perkembangan dan Kebijakan Hukum Birokrasi.....	84
1. Perkembangan Pengisian Jabatan Birokrasi.....	84
2. Kebijakan Politik Birokrasi Pemerintahan.....	86
3. Kesadaran Hukum Birokrasi Yang Transparan.....	96
4. Model Birokrasi Modern (Barat).....	99
a. Model Birokrasi Max Weber.....	100
b. Model Birokrasi David Osborne dan Ted Gaeler..	105
c. Model Birokrasi Orwell dan Parkinson.....	112
5. Model Birokrasi Indonesia.....	115
a. Model Birokrasi Paternalisme.....	116
b. Model Birokrasi Pluralisme.....	123
c. Model Birokrasi Patron-Klien (<i>Patronage</i>).....	126
d. Model Birokrasi Sentralistik.....	130
e. Model Birokrasi Otonomi Daerah.....	134

D. Mekanisme dan Penyusunan Pembangunan Birokrasi....	140
1. Reorientasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia.....	140
2. Penyusunan Standart Kompetensi Jabatan dan Evaluasi	142
3. Penerapan Sistem Penilaian Kinerja dan Individu.....	147
BAB III Metode Penelitian.....	152
A. Pendekatan Penelitian.....	152
B. Spesifikasi Penelitian.....	153
C. Sumber Data.....	154
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	156
E. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	157
F. Teknik Analisis Data.....	159
BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	161
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	161
1. Sejarah Singkat Kota Batam.....	161
2. Lambang Kota Batam.....	163
B. Kedudukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	168
1. Analisis PERMEN PAN RB No 13/2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif Sistem Hukum.....	172

2.	Analisis PERMEN PAN RB No 13/2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif Hakikat Ilmu.....	193
3.	Analisis Pembangunan Birokrasi Untuk Pengisian Jabatan Tertentu Dalam Pemerintahan.....	216
C.	Implementasi Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Model Birokrasi yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengedepankan Perspektif Pertanggungjawaban Kinerja untuk meningkatkan <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>	233
1.	Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Pemerintahan Kota Batam.....	233
2.	Model Birokrasi Lincah dan Responsif Untuk Meningkatkan <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>	259
	BAB V Kesimpulan dan Saran	274
	DAFTAR PUSTAKA	277

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah melalui daerah otonom untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan operan serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya guna kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. H.A.W. Widjaja,¹ ketika menjelaskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut komentar Djohermansyah Djohan, bahwa Pemerintah Daerah, dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi.² Sejalan dengan itu pula, dijelaskannya bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain: menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Dalam konteks itu juga dikatakannya, dilakukan penyerahan urusan.

Urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas *medebewind* atau asas pembantuan. Proses dari sentralisasi ke desentralisasi ini pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administratif,

¹ Oleh H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 76.

²Djohermansyah Djohan, *Evaluasi Kebijakan Otonomi Daerah Tahun 1999*, makalah, tanpa penerbit, Jakarta, 2003, hal. 1.

DAFTAR PUSTKA

A. Buku-Buku

Abdul Hamid S. Attamimi, dalam Disertasinya berjudul *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta 1990.

Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintah Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Cetakan II, Jakarta 2002.

_____ "*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2012

Adam Smith (1776). "*An Inquiry into the Nature of Causes of the Wealth of Nations*" dalam Mark Skusen (2005); *Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern*, Jakarta Prenada

Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Kontekstual*, Cetakan Kedua, Penerbit: UGM PRESS, Yogyakarta, 2015.

Alamsyah, *Interaksi Eksekutif-Birokrat di Kota Bandar Lampung*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2004.

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cipta Media, Makassar, 2013

Amy Y.S. Rahayu & Vishnu Juwono, *Birokrasi & Governance Teori, Konsep dan Aplikasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019

Andi Mallaranggeng, dkk, "*Otonomi Daerah Demokrasi dan Civil Society*", Media Grafika, Jakarta 2000 Hal xiii.

Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999.

A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015)

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1997.

- Bagir Manan, *"Menyongsong Fajar Otonomi Daerah"*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Barnard, I, Chester, *Organisasi dan manajemen, Struktur, Perilaku dan proses*. Jakarta: Gramedia 1992.
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Blau, Peter M. dan Marshall W. Meyer, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1987.
- Bondan Gunawan, *Otonomi Daerah, Otonomi Rakyat*, dalam buku *Peluang dan Tantangan Otonomi Daerah*, penyusun Nur Rifah Masykur, Permata Artistika Kreasi, Jakarta, 2001
- Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Med Press, (2007)
- C.S.T. Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia* Jakarta, 2005.
- Dadang Solihin, *Kamus Istilah Otonomi Daerah*, (Jakarta: Institute for SME Empowerment, 2002)
- Danang Sunyoto, *Sumber Daya Manusia*, Cetakan Kedua. Jakarta: Caps 2013.
- David Osborne dan Ted Gaebler, *Mewirausahakan Birokrasi*, terj. Abdul Rasyid, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, (1996)
- _____, *"Reinventing Government How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector"*, Terjemahan, 1992.
- Djohermansyah Djohan, *Evaluasi Kebijakan Otonomi Daerah Tahun 1999*, makalah, tanpa penerbit, Jakarta, 2003.
- Dwiyanto, Agus dan Kusumasari, Bevaola, *Budaya Paternalisme Dala Birokrasi Pelayanan Publik*. Center for Population and Policy Studies, UGM-Yogyakarta. (2001)
- _____, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, (2002)

- Faried Ali, *Teori Dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Fatah E. Saefulloh, *Bangsa Saya yang Menyebabkan: Catatan Tentang Kekuasaan yang Pongah*, Bandung: Rosdakarya, 1998
- Fayol, Henry, *Industri dan Manajemen Umum*, Terj. Winardi, London: Sir Issac and Son, 1985.
- Franz Magnis Suseno, "Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar KeNegaraan Modern", PT Gramedia, Jakarta, 1987
- G. Shabbir Cheema dan Dennis A.Rondinelli, *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*, Beverly Hills/London/New Delhi, Sage Publikations, 1983
- Gery Yulk, *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Indeks, Jakarta: 2010
- Ghofur Ahmad, *Arsitektur Assesment Center*, Jakarta: PT. Grasindo, (2015) Progo Nurdjaman, "Reformasi Birokrasi di Era Otonomi Daerah". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Birokrasi di Era Otonomi Daerah, Bandung, (2002) hal 45.
- Giddens, Anthony. *Capitalism and Social Modern Theory: An Analysis of Writing of Mark, Durkheim and Max Weber, atau Kapitalisme dan Teori Sosial Klasik dan Modern : Suatu Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, terjemahan Soeheba K. UI Press. Jakarta, 1986.
- GTZ, *Pegangan Memahami Desentralisasi, Pembaruan*, Yogyakarta, 2004.
- Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.
- H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- H.Murtir Jeddawi "Negara Hukum, Good Governance, Dan Korupsi di Daerah", Total Media, Yogyakarta, 2011.
- H.R Otje Salaman S, dan Anthon F. Susanto *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Menemukan Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

- Hamijoyo, Santoso S. *Aplikasi Model Komunikasi Dari Perubahan Sikap Dalam Riset Pembangunan Masyarakat Pedesaan "Reinterpretasi Beberapa Data*. Bandung: UPI, (2003)
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel&Russel, 1961.
- _____, *Teori dan Negara: Dasar-dasa Ilmu Hukum Normatif sebagai ilmu hukum deskriptif empiric (General Theory dan of law and state)* diterjemahkan oleh H.Soemardi B.E, Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- _____, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Kompas, Jakarta, 2003
- HAS Natabaya, Lembaga (Tinggi) Negara Menurut UUD 1945, dalam Refly Harun, Zainal A.M. Husein, dan Bisariyadi (ed.), *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2004.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- HAW Widjaja, "Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 70-71.
- HAW, Wijaya "Penyelenggaran Otonomi di Indonesia", Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2005.
- Heather Marquette, *Corruption, Politics and Development: The Role of The World Bank*, (Palgrave Macmillan, 2003), cet.I.
- Hotma P Sibuea, "Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan &Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010.
- Idham "Paradigma Pembentukan Undang-undang", Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2005
- _____, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Presfektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat dan Negara Berkesejahteraan"*, Bandung; 2014.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996.
- J.C.T. Simorangkir dkk, *dalam kamus hukum*, Sinar Grafika, Jakarta; 2010.

- Jemmy Rumengan, "Metodologi Penelitian, dengan menggunakan SPSS". Cipta Pustaka Media Perintis, Medan, 2009
- _____," Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", Cipta Pustaka Media, Bandung, 2015
- Jhon Ingham, *Strategic Human Capital Management, Creating Value Thourght People* (Oxford: Butterword-Heinemann, 2007).
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 106
- John Alder, 1989, *Constitutions and Administrative Law*, London, The Macmillan Press LTD.
- John Ball, *Indonesian Law Commentary and Teaching Materials*, Faculty of Law University of Sydney, Sydney, 1981
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris - Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1981
- Juanda Nawawi, "Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik", Makasar: CV Menara Intan, 2012.
- Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik*, (Bandung: Nuansa , 2009).
- Katz, Daniel & Kahn, Robert L, *The Social Psychology of Organizations. Dalam Becker & Neuhauser The Efficient Organizations. New York. Elsevier, 2006.*
- Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Penerbit A3 dan Nasa Media Malang, 2010.
- Komaruddin Hidayat, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Cet III, (Jakarta: ICCE, 2007).
- Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli *Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht*, Universitaire Pers Leiden, 1948, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*. Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975.

- Irawan Soetjipto, *Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia (Jilid II)*. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1989
- Luthfi Widagdo Eddyono, Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010.
- M. Solly Lubis, *Dimensi-dimensi Manajemen Pembangunan*. Mandar Maju, Bandung, 1996.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994
- Mardiasmo, *otonomi dan manajemen keuangan daerah*, Yogyakarta, 2002.
- Markus Lukman, dalam Tesis berjudul, *Freies Emersen dalam Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Kota di Kota Madya Pontianak*, tidak diterbitkan, Universitas Padjajaran Bandung, 1989.
- Markus Lukman, *Freies Emersen dalam Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Kota*, Bandung, 1989.
- Mas'ud Said, *Birokrasi di Negara Birokratis*, Malang: UMM Press, 2007
- Max Weber, *Economy and Social: and outline of interpretive sociology*. University of California Press, Brekeley, CA 1978.
- Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Miftah Thoha, *Perspektif Perilaku Birokrasi: Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara Jilid II*, Rajawali, Jakarta, 1987.
- _____, *Birokrasi & Politik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Mocheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012.
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- _____, *Amanademen Kelima UUD 1945* Jakarta, 2008
- Monier, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Muhamad Rakhmat, *Hukum Administrasi Negari Indonesia*. Bandung, (2014)

- Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Murti Jeddawi, *Karier PNS di Persimpangan Jalan: Sebuah Refleksi Atas Kebijakan Kepegawaian di Era Otonomi Daerah*, Gallery Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- _____, *Dilema Pembinaan Pegawai di Era Otonomi Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- _____, *Mengefektifkan Peran Birokrasi Untuk Memangkas Prilaku Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- N.Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, diterbitkan Lakshang Mediatama, Palangkaraya, 2009.
- P3DI Sejen DPR Republik Indonesia, Editor I.W Rusastra, *Agenda Pembangunan Nasional: Perspektif Kebijakan dan Strategi Pengembangan Daerah*, Azza Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Peter.F Drucker, *Manajemen: Tugas, Tanggung Jawab dan Praktek*, Jakarta: PT Gramedia, 1995.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.
- Philipus M.Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No 5 & 6 Tahun XII, Jakarta, 1997.
- Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986.
- R. Kranenburg dalam A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara – Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V*. (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 1990).

- Richard Rose, " *On the Priorities of Government: A Developmental Analysis of Publik Policy*, Departement Of Politics, University of Scrathclyde, Mimiographed, 1975.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- _____, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, PT Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2014.
- Rina Martini, *Birokrasi dan Politik*. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro, 2012.
- Riyadi dan Oeddy Supriady Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Mengenal Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Romli Atmasasmita, *Teori hukum Intergratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Safari Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara, Center for law and Good Governance Studies*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Samodra Wibawa, " *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*", Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah Upaya Dalam Mengatasi Kegagalan*, Jakarta Selatan, Kata Press, 2014.
- Satjipto Raharjo, dalam bukunya " *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*", Genta Publishing, Yogyakarta; 2013
- Sedarmayanti, " *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*", Mandar Maju, Bandung 2003.
- _____, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sinambela, Lijan Poltak, *Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Implikasi*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu 2012.

- Soerya Respationo, *Etika Politik Dalam Suatu Negara Demokrasi*, Perdana Publishing, Medan 2011.
- Soesilo Zauhar, *Reformasi Adiminstrasi: Konsep, Dimensi dan Strategi (Cetakan Kedua)*, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara, 2002.
- Sofyan Effendy, *Pembangunan Kualitas Manusia: Suatu Perspektif Administrasi Negara*, Dalam Sofyan Effendy, Sjafrin Syairin, dan M. Alwi Dahlan (ed), *Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, (1990).
- Sri Hartini, dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Sudono Syueb, "Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah Sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi", Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Pembinaan SDM Berbasis Kompetensi*, PT Pustaka Binama Presindo Jakarta, 2011.
- Sulistyowati Arianto, *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, (2009)
- Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Sunarya, *Impelementasi Good Government dan Clean Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, (Jakarta: Irjen Depag, 2007).
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia*, PT Gunung Agung, Jakarta, 1968.
- Thoha, Miftah *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Jakarta: Rajawali Press, (1991)
- Tjiptoherijanto dan Abidin S.Z, *Reformasi Administrasi dan Pembangunan Nasional*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Veithzal Rivai Dkk, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi Edisi Keempat*, Rajawali Pers, Jakarta 2014.
- Wahyudi Kumoroto, *Etika Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005.
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- _____. *Perilaku Dalam Organisasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2013
- Wukir. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Sekolah*, Cetakan Pertama. Jakarta: Multi Presindo.
- Yudha Bhakti: Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2000
- Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, Rajawali Pers, Jakarta 2012.
- Zainuddin Mustap, *Bunga Rampai Birokrasi: Isu-isu strategik Seputar Birokrasi*. Celebes Media Perkasa, (2017).
- Zudan Arif Fakrullah, *"Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- _____. *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, pada tanggal 6 Nopember 1974.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038, pada tanggal 18 Juli 2009.
- Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494, pada tanggal 15 Januari 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 pada tanggal 23 Juni 1975.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258 pada tanggal 1 Desember 2011.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

C. Makalah, Jurnal, Disertasi, Tesis, Buku Pedoman, Surat Kabar dan Majalah

Abdul Kadir, *Prinsip-prinsip dasar rasionalisasi birokrasi Max Weber Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara*. JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik. (2015). Vol. 1, No. 1.

Achmad Nurmandi, *Perilaku Birokrasi Publik di Indonesia: Sebuah Kajian Teoritis*. Jurnal Sosiohumaniora, (2005). Vol. 7, No. 2

Afan Gaffar, *Hubungan Patron Client dan Kosekuensinya Terhadap Lahimya Pengusaha Indonesia: Review Buku Dr. Yahya Muhaimin*. Jurnal Unisia (1991), 10, XLIV.

Alex Rumondor, *Tantangan Peran Birokrasi Sentralistik, Integrasi Politik Pemerintahan Daerah, Prediktor Sistem Komunikasi Nasional Baru*. Sociae Polites, (2014), Vol. 15 No. 01

Ali Abdul Wakhid, *Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia*. Jurnal TAPIS (2011) Vol.7 No.13

Andries Lionardo, *Alternatif Strategi Model Pengembangan Organisasi Publik di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Wacana Publik. (2008). Vol. 4, No. 1.

Dede Mariana, *Reformasi Birokrasi Pemerintah Pasca Orde Baru*. Sosiohumaniora, (2006). Vol. 8, No. 3

Dwi Martini, *Good Governance Dalam Pelayanan Publik, dalam buku yang berjudul Konsep, Strategi dan Implementasi Good Governance Dalam Pemerintahan*, (Jakarta: Irjen Depag RI, 2007).

Eko Herry Susanto, *Kelambanan Reformasi Birokrasi dan Pola Komunikasi Lembaga Pemerintah*. Jurnal ASPIKOM, (2010), Volume 1, Nomor 1.

Jorgensen, T.B. Weber and Kafka: *The Rational and the Enigmatic Bureaucracy*. Publik Administration, (2012). Vol. 90, No. 1.

- Kapoor, Basheshar Nath *Modern Bureaucracy – Its Causes and Consequences of Growth*. Thesis for Master of Arts, The Political Science Department of Kalamozoo College, (1963).
- Marzuki, Mukhamad Murdiono dan Miftahuddin *Model Birokrasi Pemerintah Daerah Era Otonomi Daerah*. *Jurnal Penelitian Humaniora*, (2010). Vol. 15, No. 2
- Mahmudi, "Manajemen Kinerja Sektor Publik". UPP AMP YKPN, Yogyakarta, tahun 2005.
- Patrisia, Novliza Eka. *Reformasi Birokrasi Menurut Hukum Administrasi Pembangunan (Sebuah Kajian Reformasi Birokrasi)*. *Jurnal Ilmiah IDEA*. (2017). Vol. 13. No. 36
- Pelras, Christian, *Patron-client ties among the Bugis and Makassarese of South Sulawesi*. Dalam Tol, R., Von Dijk K., Acciaioli, G. (eds), *Authority and Enterprise among the Peoples of South Sulawesi*, (2000), Vol. 156, No. 3, KITLV Press.
- R. Siti Zuhro, *Good Governance Dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia*. *Jurnal Politik Indonesia*. (2010), Vol. 7, No. 1.
- Riggs, Fed. *Introduction: shifting meanings of the term "bureaucracy"*. *International Social Science Journal*, (1979)Volume XXXI. No. 4
- Scott, James C, *Comparative Political Corruption*. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall(1972). hal 5 James C. Scott, *Comparative Political Corruption*. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, (1972).
- Stephen P Robbins, *Organization Theory: Structure, Design, and Application*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. (1990).
- Subando Agu Margono, *Birokrasi, demokrasidan reformasi: Sudut Pandang Administrasi Negara*. JSP. (1998). Vol. 2, No. 2.
- Suwarno *Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik*. *UNISIA*. (2008). Vol. XXXI No. 69
- Tai, Cheng-Tek dan Tsai, Tsung-po, *Who makes the decision? Patient's Autonomy Vs Paternalism in Confusion Society*. *Croatian Medical Journal*, Vol. 44. (2003).
- Trimurti Ningtyas, *Model Hubungan Kepercayaan Masyarakat (Citizen Trust) Berdasarkan "Disconfirmation of Expectation" di BPN Surabaya.. Jejaring Administrasi Publik*. (2013) Th V. Nomor 1.

- Yates, Douglas, *An Analysis of Publik Bureaucracy*, New York, St. Martin Press. (1982).
- Yeni Sri Lestari, *Konsep Orwelisasi dan Parkinsonisasi Dalam Sistem Pemerintahan Publik*. *Jurnal Publik Policy*. Vol II No 2
- Yusrialis, Y, *Budaya Birokrasi Pemerintahan (Keperihatinan dan Harapan)*. *Jurnal Sosial Budaya*, (2012) Vol. 9 No. 1.
- Zuhro, R. Siti, *Good Governance Dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia*. *Jurnal Politik Indonesia*. (2010), Vol. 7, No. 1
- Buku Pedoman Penulisan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Jakarta, 2016
- Bomer Pasaribu, "*Upaya Penataan Kembali State Auxiliary Bodies melalui Peraturan Perundang-Undangan*", Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum "Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanganan" Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Faisal, Edy, Muttaqin, "*Optimalisasi Kinerja Ombudsman Republik Indonesia sebagai Upaya Reformasi Birokrasi Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia*". *Makalah Disampaikan dalam Focused Grup Discussion (FGD) antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Riau*, pada 15 April 2013 di Kampus Fakultas Hukum Universitas Riau, Gobah-Sail, Pekanbaru.
- Idham, "*Makalah Disampaikan Dalam Acara Sosialisasi dan Bimbingan teknis Serta Penandatanganan Berita Acara Pra Penetapan SPP dan SKP Tanjung Balai Karimun di Hotel Aston Tanjung Balai Karimun pada 15 Oktober 2014.*"
- Kasmirudin, *Kinerja Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru (Suatu Tinjauan Dari Perspektif "Teori Budaya Organisasi)* *JURNAL APLIKASI BISNIS* Vol. 1 No. 1 Oktober 2010.
- Lukman Markus, dalam Tesis, berjudul *Freies Emersen dalam Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Kota di Kotamadya Pontianak*, Tidak diterbitkan, Universitas Padjajaran Bandung, 1989.

- Muchlis Hamdi, *"State Auxiliary Bodies di Beberapa Negara"*. Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum *"Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan"* Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2007
- Satjipto Rahardjo, *Karakteristik Dan Bentuk Hukum Dalam Meningkatkan Pelayanan Dan Keadilan Berbangsa Dan BerNegara*, Makalah, disampaikan pada pertemuan ilmiah di LIPI, Jakarta pada tanggal 17 dan 18 Oktober 1977.
- Gede Winasa, *disampaikan dalam workshop "Best Practices Reformasi Birokrasi"* Surakarta, 25 April 2007.



